

ANALISIS SEGITIGA SPK PADA KEKERASAN LANGSUNG ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) FORUM BETAWI REMPUG (FBR) DAN PEMUDA PANCASILA (PP)

Dina Elina Saragih¹, Soni Akhmad Nulhaqim², Muhammad Fedryansyah³

¹Kementerian Sosial Republik Indonesia

^{2,3}Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: dina.elina@kemsos.go.id

ABSTRAK

Di Indonesia, ormas mulai bermunculan ketika terjadi perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, khususnya saat kapitalis merkantilis diperkenalkan oleh Belanda. Menurut data Kementerian Dalam Negeri jumlah ormas di Indonesia sampai tahun 2019 telah mencapai 431.465. Akhir-akhir ini keberadaan ormas yang seharusnya diharapkan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat malah sebaliknya menjadi hal yang meresahkan. Tulisan ini akan membahas tentang salah satu ormas terbesar di Indonesia yaitu Pemuda Pancasila (PP) yang belakangan ini terlibat konflik dengan ormas Forum Betawi Rembug (FBR). Kedua ormas ini dalam berita media tercatat mengalami konflik yang berlangsung berulang-ulang bahkan berujung kepada kekerasan. Tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi kekerasan langsung dalam kejadian-kejadian konflik yang terjadi diantara kedua ormas ini. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menyunting, merangkum hasil atau temuan sebelumnya yang telah dikelompokkan, kemudian dibantu dengan analisis segitiga SPK Galtung. Dengan analisis Segitiga ABC ditemukan aspek attitude, behaviour dan Contradiction pada konflik yang terjadi di antara kedua ormas ini. Diharapkan dengan temuan aspek tersebut pemerintah maupun ormas yang terlibat semakin dapat menemukan solusi yang ideal untuk adanya terwujudnya resolusi konflik.

Keyword: Ormas, Konflik, Kekerasan, Teori Galtung.

ABSTRACT

In Indonesia, mass organizations began to emerge when socio-economic changes occurred during the colonial period, especially when mercantilist capitalists were introduced by the Dutch. According to data from the Ministry of Home Affairs, the number of mass organizations in Indonesia until 2019 has reached 431,465. Lately, the existence of mass organizations that should be expected to support the realization of social welfare has instead become a disturbing thing. This article will discuss one of the largest mass organizations in Indonesia, namely Pancasila Youth (PP), which has recently been involved in a conflict with the Betawi Rembug Forum (FBR) mass organization. The media reported that these two mass organizations experienced repeated conflicts that even led to violence. This paper tries to explore direct violence in conflict incidents that occurred between these two mass organizations. The method used in writing this article is a literature study. Data analysis in this study was carried out by editing, summarizing the results or previous findings that had been grouped, then assisted by an analysis of the Galtung SPK triangle. With the ABC Triangle analysis, attitude, behavior and contradiction aspects were found in the conflicts that occurred between the two mass organizations. And it is hoped that with the findings of these aspects, the government and the mass organizations involved will increasingly be able to find ideal solutions for the realization of conflict resolution.

Keyword: Mass Organizations, Conflict, Violence, Galtung Theory

PENDAHULUAN

Sampai saat ini pertikaian antar organisasi kemasyarakatan (Ormas) masih sering terjadi. Banyak pemberitaan baik melalui media massa maupun media sosial

yang memberitakan tentang konflik yang terjadi diantara kedua ormas dan konflik ini berujung kepada kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban. Walaupun masih banyak lagi ormas yang juga sering

bertikai dan berujung pada kekerasan, namun dalam tulisan ini akan lebih membahas pada dua ormas yang akhir-akhir ini sering terlibat dalam konflik, yaitu Forum Betawi Rembug (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP). Adapun penyebab dari munculnya konflik antar ormas ini yaitu karena adanya persaingan wilayah, nilai-nilai ekonomis, dan masalah kelompok yang semakin besar.

FBR merupakan organisasi masyarakat etnis Betawi yang berpedoman Islam dan berdiri sejak tanggal 28 Juli 2001. Dibentuk oleh dua orang kyai Betawi yaitu Fadloli El Muhiir dan Lutfi Hakim dan berlokasi di Pondok Pesantren Ziyadatul Muhtadi'ien, Padaengan, Cakung, Jakarta Timur. Ormas ini terbentuk diawali dengan adanya kepedulian para tetua warga betawi yang melihat situasi dan kondisi yang dihadapi suku betawi di Jakarta seperti ketertinggalan dan keterhimpitan, dengan keadaan Ibukota yang semakin banyak didatangi oleh para pendatang dan berbagai kebijakan daerah yang dianggap tidak memperdulikan etnis ini. Para pendiri forum ini hanya ingin dihargai dan dianggap di kampungnya sendiri. Dengan menjadi warga yang diprioritaskan dalam setiap aspek pembangunan, baik itu industri, perdagangan dan lain-lain (Kamil, 2019).

Sementara itu PP adalah organisasi masyarakat yang anggotanya mencakup seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada batasan antara suku, etnis, agama dan juga profesi. Organisasi tersebut terbentuk dan dilaksanakan dengan basis pengembangan masyarakat yang berkualitas, sehingga melahirkan generasi-generasi yang berkompeten dan berdaya saing. Didirikan pada tanggal 28 Oktober 1959 bermaksud di Jakarta, oleh A. Yani, A.H Nasution, Gatot Subroto. Dengan tujuan untuk memberikan perlawanan kepada Partai Komunis yang ingin merubah Ideologi Negara Indonesia, inilah awal yang menjadi karakter dan orientasi ormas PP. Organisasi ini semula bernama pemuda patriotik yang merupakan bagian dari partai IPKI, yang berjuang

mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi Negara (Arif, 2013).

Ormas PP merupakan ormas yang paling menonjol dalam memberantas perjudian, prostitusi, peredaran narkoba, premanisme dan pemerasan pada tahun 1980-1990an, sehingga ormas ini dikenal dengan organisasi yang identik dengan kekerasan. Terlebih di masa orde baru, ormas PP menjadi salah satu kekuatan rezim saat itu. Melakukan kegiatan serta gerakan menghentikan aktivitas yang dinilai akan mengancam kepemimpinan saat itu. Namun setelah orde baru, ormas PP masih tetap mempertahankan keberadaannya melewati masa reformasi, dengan berusaha mengubah citra yang selama ini identik dengan kekerasan dan premanisme menjadi ormas yang banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Aktivitas nyata yang dilakukan ormas PP mulai terusik dengan kehadiran ormas-ormas lain yang menimbulkan konflik-konflik yang berawal dari hasutan-hasutan ormas-ormas tertentu, seperti ormas FBR yang memiliki kesamaan misalnya dalam penerimaan anggota ormas tetapi seolah-olah dengan ajaran atau paham yang berbeda. Namun FBR lebih menonjolkan pengakuan atas nama etnis betawi dalam melakukan penerimaan anggotanya dan lebih berorientasi pada masalah kemiskinan dan ketidakberdayaan kelompok muda dalam pekerjaan (Arif, 2013).

Menurut Kartono, dkk dalam (Kartono et al., 2018), bahwa konflik yang terjadi antara ormas PP dan FBR berlangsung 5 (lima) kali sepanjang tahun 2013. Kejadian penyerangan, pengeroyokan serta penganiayaan yang dilakukan oleh 16 orang yang tak dikenal terhadap anggota ormas FBR, kemudian penyerangan pos FBR yang dilakukan orang tak dikenal sebanyak 50 orang, dan pembakaran R.4 milik PP yang dilakukan oleh FBR. Dari kejadian ini banyak korban yang mengalami luka berat maupun ringan serta banyaknya kerugian sarana dan prasarana yang dirusak.

Seperti halnya juga pada penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu, dkk (2020), konflik yang terjadi di antara ormas FBR dan PP sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dimana kronologi kejadian konflik yang dibahas yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Menurutnya konflik yang terjadi di antara kedua ormas ini kerap terjadi karena adanya rasa kesetiakawanan yang tinggi. Dan permasalahan tersebut timbul dari anggota ormas level akar rumput (Gusti & Santika, 2020). Sesuai dengan data dari Polda Metro Jaya, dari sekian banyak kasus kekerasan ormas yang terjadi, FBR mendominasi dalam perilaku kekerasan. Kemudian ormas PP menempati urutan kedua setelahnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa konflik yang terjadi di antara kedua ormas ini yang telah banyak mengakibatkan jatuhnya korban merupakan suatu bentuk kekerasan langsung. Adapun kekerasan langsung menurut Galtung (Dwi Eriyanti, 2017) memiliki berbagai macam bentuk. Pada bentuk klasik, terdapat kekuatan fisik, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan penyerangan seksual. Demikian juga dengan kekerasan melalui kata-kata (verbal) diartikan sebagai kekerasan secara luas.

Selain dari kekerasan langsung, bentuk lain kekerasan yang ditekankan oleh Galtung adalah kekerasan struktural. Kekerasan tersebut tidak dilakukan oleh manusia atau masyarakat tetapi kekerasan tersembunyi di dalam struktur yang lebih kecil ataupun lebih besar (Dwi Eriyanti, 2017). Kemudian bentuk kekerasan kultural merupakan kekerasan yang mencakup dimensi budaya, termasuk agama dan ideologi. Bahasa dan simbol budaya seperti seni, ilmu pengetahuan dan mitologi, konsep budaya tertentu, dan bukti nilai budaya. Hal-hal tersebut digunakan oleh masyarakat untuk membenarkan tindakan kekerasan dan konflik (Ismiati & Fedryansyah, 2017).

Berbagai pemikiran yang telah mengungkapkan tentang konflik, seperti

penelitian yang dilakukan oleh Susanto, dkk (2020), (Gusti et al., 2018) dan (Kartono et al., 2018) yang berfokus pada penanganan atas konflik yang terjadi antar ormas dan berbagai peranan pemerintah/lembaga dalam menangani konflik tersebut. Terdapat juga penelitian tentang Pola Transformasi Organisasi Masyarakat (Ormas) Menjadi Kelompok Kekerasan dan Radikalisme, dilakukan oleh G. E. Pramono (2015), Febrianyah (2013) dan (Yutizar & Muhajir, 2021).

Konsep kekerasan yang diungkapkan oleh Galtung dikenal dengan segitiga kekerasan, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi. Dalam tulisan ini penulis akan berusaha untuk mengidentifikasi faktor terjadinya konflik dan kekerasan langsung yang terjadi di antara ormas PP dan FBR melalui analisis segitiga SPK Galtung.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Dimulai dari tahap mengumpulkan berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, makalah dan informasi dari berbagai media. Kemudian literatur tersebut dipelajari, dan lebih memfokuskan pada literatur yang memuat isu konflik antar ormas, khususnya konflik yang terjadi diantara dua ormas yaitu FBR dan PP.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menyunting, merangkum hasil atau temuan sebelumnya yang telah dikelompokkan, kemudian dibantu dengan analisis segitiga SPK Galtung.

TINJAUAN PUSTAKA

Konflik dan Kekerasan

Menurut Fisher, konflik dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda. Dimana konflik adalah hubungan antara dua orang atau dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sementara kekerasan meliputi

tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik mental, sosial atau lingkungan dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh (Fisher, 2000).

Kekerasan dalam arti luas digambarkan oleh Galtung merupakan penghalang yang sebisa mungkin dapat dihindari karena mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk mengenali diri sendiri dengan baik. Menurut Galtung penghalang tersebut sebenarnya dapat dihindari, sehingga terhindar dari kekerasan. Lebih singkatnya menurut Galtung, kekerasan adalah suatu kondisi fisik, emosional, bahasa, kelembagaan, struktural, atau mental, perilaku, sikap, kebijakan, atau kondisi yang melemahkan, mengendalikan, atau menghancurkan diri sendiri atau orang lain (Dwi Eriyanti, 2017).

Perilaku kekerasan merupakan fenomena yang unik, meskipun seperti halnya kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang berkembang sejalan dengan perkembangan pada masyarakatnya. Perkembangan kekerasan pada abad ke-20 terkait erat dengan keinginan untuk menunjukkan integritasnya, impian untuk mengalami dunia yang damai, dan kewajiban negara untuk melindungi kehidupan manusia dan memajukan pemeliharaan ketertiban sosial (G. E. Pramono, 2015).

Kekerasan menurut Gould dalam (G. E. P. Pramono, 2020) kelompok yang menggunakan kekerasan dalam bertindak ketika terjadi suatu konflik dan saling mengikat diantara anggota kelompok sebelum kekerasan dilakukan, disebut kelompok kekerasan.

Penjelasan itu menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi diakibatkan adanya sebuah krisis dalam sebuah konflik sosial yang tidak pernah berujung yaitu bahwa konflik terkait merupakan sebuah penggambaran perjuangan suatu kelompok untuk kepentingan keamanan kelompok, pengakuan kelompok, dan penerimaan atas keberadaan kelompok terkait serta

keikutsertaan yang adil dalam bidang ekonomi bahkan politik. Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan konflik yang bekepanjangan atau tidak pernah berujung, yaitu pertama, kandungan komunal, dimana yang dimaksudkan disini adalah pada kelompok atau ormas identitas tertentu seperti ras, etnis, agama dan budaya. Hal ini mengarah kepada adanya ketidaksamaan kepentingan suatu kelompok atau ormas dengan kepentingan Negara (Isnaini, 2017).

Selanjutnya yang kedua mengapa konflik terjadi berkepanjangan sumber utamanya adalah adanya penguasaan atas kebutuhan manusia yang kemudian diartikan secara kolektif. Kebutuhan manusia ini dinilai menjadi sebuah hak dasar, seperti adanya keamanan, pemberdayaan atau hak untuk dipekerjakan, kemudian adanya akses dalam bidang politik, dan sebuah pengakuan dalam budaya dan religi. Dalam hal ini konflik terjadi ketika adanya perebutan objek kekuasaan atau kebutuhan oleh dua atau lebih individu maupun kelompok (Adiansah, Apsari & Raharjo, 2019). Sementara itu dalam perebutan tersebut negara tidak mampu menyelesaikan masalah ini, di sisi lain kebutuhan tersebut semakin tidak dapat dirundingkan sehingga akan memperparah konflik yang ada menjadi lebih kejam dan jika ada pemicunya akan memungkinkan untuk menjadi sebuah tindakan kekerasan.

Sehingga hal tersebut akan menjadi sumber konflik yang bekepanjangan ketiga, yaitu kekuasaan Negara yang tidak mampu memberikan kepuasan kepada kebutuhan manusia di dalam sebuah kelompok atau ormas, akan menimbulkan pemberontakan dan konflik yang tidak akan pernah selesai.

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa penyebab timbulnya kekerasan dalam sebuah konflik merupakan ciri dan masalah yang begitu rumit. Suatu kebenaran mutlak jika kesenjangan sosial atau ketimpangan merupakan salah satu pemicu dari adanya kekerasan.

Analisis Konflik Menggunakan Segitiga Sikap (*Attitude*), Perilaku (*Behaviour*), Kontradiksi (*Contradiction*) Galtung

Galtung menyatakan bahwa sebuah konflik dapat diungkapkan dengan dalam sebuah segitiga, dengan dengan sikap (*Attitude*), perilaku (*Behaviour*), kontradiksi (*Contradiction*). Kontradiksi mengarah kepada dasar situasi konflik seperti adanya ketidaksepahaman tujuan, termasuk adanya ketimpangan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bentrok, yang diakibatkan oleh bentrokan antara nilai sosial dan struktur sosial. Kontradiksi tersebut diputuskan oleh pihak-pihak yang bentrok, hubungan diantara kelompok, dan benturan kepentingan inheren (Galtung, 1965).

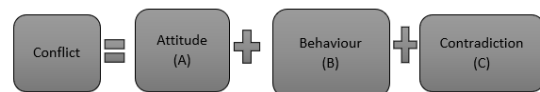
Sementara sikap menunjukkan pemahaman pihak yang bentrok antara satu sama lain dan kesalahpahaman di antara pihak-pihak tersebut. Serta pemahaman akan pengakuan atas isu-isu yang berkembang dengan kelompok lain. Dalam konflik dan kekerasan, di antara pihak-pihak yang berkonflik cenderung mengembangkan stereotip seperti saling meremehkan. Sikap ini sering terpengaruh Perasaan seperti ketakutan, kemarahan, kepahitan, dan kebencian. sikap ini termasuk ke dalam unsur perasaan, kepercayaan dan harapan. Perilaku merupakan kerjasama atau pemaksaan, gerak tangan atau tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Perilaku konflik dengan kekerasan dicirikan oleh ancaman, pemaksaan, dan serangan yang merusak.

Dalam bukunya yang berjudul "*Peace by Peaceful Means*" Galtung merumuskan bahwa konflik merupakan bangunan triadik yang tersusun atas tiga elemen tersebut. Konsep segitiga ini jika dijelaskan secara sederhana bahwa konflik terjadi ketika terdapat perilaku, sikap, dan asumsi yang kontradiktif terhadap suatu hal di antara pihak-pihak yang sedang bertikai. Pertentangan yang terjadi dapat bersifat manifes atau laten. Penjelasan tersebut diuraikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1 : Segitiga ABC Galtung

Sebuah konflik, akan mengalami fase kekerasan berturut-turut, sebelum kekerasan, masa kekerasan berlangsung dan setelah kekerasan. Fase tersebut diantarai oleh terurainya kekerasan ataupun adanya perdamaian. Ketiga elemen (A,B,C) harus dipertimbangkan pada semua fase (Galtung & Fischer, 2013).



Gambar 2 Life-cycle of a conflict (Galtung & Fischer, 2013)

Siklus konflik seperti gambar di atas menjelaskan, bahwa konflik terjadi ketika terdapat sikap, perilaku dan asumsi yang kontradiktif terhadap suatu hal/ kejadian. Pertentangan tersebut dapat bersifat manifes atau laten. Dimana manifes merupakan tindakan yang dapat diamati dengan perilaku dan laten dapat diamati dengan sikap dan kontradiksi atau anggapan yang dapat memicu konflik (Pathak, 2014).

Gambaran Umum Konflik FBR dan PP

Adapun sebelum melakukan analisis konflik di antara ormas PP dan FBR, terlebih dahulu dengan melihat riwayat bentrok yang telah terjadi. Riwayat bentrok dapat dipetakan melalui alat bantu dalam penahapan konflik yaitu urutan kejadian. Dimana alat bantu ini merupakan suatu alat yang sederhana, yang berupa grafik yang menunjukkan kejadian-kejadian yang telah ditempatkan sesuai dengan waktunya dan tentunya dapat menggambarkan kejadian-kejadian secara kronologis (Fisher, 2000).

Urutan kejadian yang digunakan disini bukan alat bantu penelitian yang utama, tetapi merupakan suatu cara untuk mengarahkan pembahasan dan sebagai proses belajar, bahwa dalam suatu konflik pasti akan terjadi ketidaksepakatan tentang kejadian-kejadian mana yang paling penting dan bagaimana untuk menjelaskannya.

Gambar 3 menunjukkan garis besar bagaimana alat bantu urutan kejadian ini digunakan, untuk mengkaji kejadian bentrokan di antara ormas PP dan FBR menurut sumber data yang di dapat.



Gambar 3. Urutan kejadian bentrokan antara ormas PP dan FBR

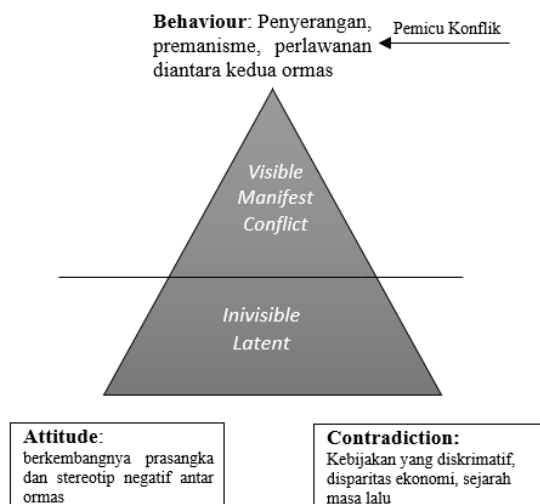
Jika dilihat dari tabel tersebut, diketahui bahwa bentrokan yang terjadi seringkali dipicu oleh hal-hal yang berulang. Seperti halnya identitas ormas, kecemburuan, perebutan lahan baik itu lahan parkir atau wilayah pungutan lainnya. Konflik yang tidak pernah selesai dan selalu berakhir dengan adanya kekerasan oleh karena

tumbuhnya sikap main hakim sendiri di dalam kelompok ini.

Konflik yang terjadi di antara kedua ormas ini pada awalnya bersifat laten, masing-masing anggota ormas saling memiliki anggapan atau asumsi terhadap sikap anggota ormas lainnya, sehingga hal ini sering memicu adanya konflik yang berulang. Padahal bisa jadi hal tersebut hanya salah paham saja. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik di antara kedua ormas ini, teridir dari faktor struktural, faktor akselerator, dan faktor pemicu. Adapun faktor strukturalnya meliputi, kurang baiknnya susunan dalam struktur organisasi yang dibuat, ada unsur kebijakan pemerintah juga yang dianggap diskriminatif, adanya ketidakseimbangan proporsi penduduk pendatang dan penduduk asli. Kemudian faktor akselerator konflik kedua ormas ini adalah rentetan kejadian demi kejadian yang terjadi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 di antara ormas PP dan FBR menjadi katalisator yang menyebabkan konflik semakin sering terjadi bahkan semakin memanas dan membesar karena dendam yang sudah mengakar.

Analisis Eskalasi Konflik Antara Ormas PP dan FBR Dengan Segitiga ABC

Terakhir faktor penyebabnya adalah faktor pemicu, dimana permasalahan yang dilakukan antar anggota ormas terhadap satu sama lain. Sehingga jika dituangkan dalam konsep segitiga ABC, konflik di antara ormas PP dan FBR dapat digambarkan sebagaimana berikut ini.



Gambar 4 Analisis Eskalasi Konflik Ormas PP dan FBR dengan Segitiga ABC

Mengacu pada gambar segitiga ABC tersebut di atas, maka terlihat bahwa melalui segitiga ABC Galtung, yang terdiri dari Attitude yang elemennya antara lain prasangka dan stereotip, kemudian Behavior dengan elemennya berupa sebuah aksi seperti penyerangan, premanisme dan perlawanan. Serta contradiction yang elemennya merupakan sebuah distribusi ataupun posisi kekuasaan. Selanjutnya posisi *attitude* dan *contradiction* berada pada *invisible latent* yang artinya kedua hal ini tidak dapat terlihat oleh kasat mata dalam konflik. Karena hal tersebut tersimpan dalam perasaan orang-orang yang terlibat konflik. Sementara *behaviour* terletak pada posisi *visible manifest* yang dapat diartikan konflik terlihat dalam kasat mata berupa tindakan, maupun ucapan yang diberikan masing-masing yang terlibat konflik tersebut. Selanjutnya ulasan konflik antara ormas PP dan FBR dengan menggunakan analisis segitiga ABC Galtung dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Attitude (A)

Penulis mengidentifikasi bahwa attitude yang timbul dalam konflik ormas PP dan FBR lebih banyak disebabkan oleh adanya prasangka dan stereotip negatif. Prasangka tersebut muncul saat menilai sikap atau tindakan ormas lain. Dalam beberapa kasus konflik yang terjadi, sering ditemukan bahwa masing-masing ormas

membuat penilaiannya sendiri atas ormas lain, sehingga membentuk sebuah stereotip yang negatif. Ormas PP menganggap bahwa ormas FBR melakukan sesuatu hal yang akan merugikan kepentingan ormas demikian sebaliknya. Diketahui bahwa ormas PP merupakan sebuah kelompok etnis betawi asli, yang memiliki prasangka atas ormas PP yang merupakan organisasi yang berawal dari para militer di Indonesia. Sehingga ormas PP dianggap seperti sombong dan arogan. Padahal hal tersebut tidak dapat disamaratakan untuk setiap anggota dari ormas tersebut. Demikian sebaliknya ormas FBR juga dianggap eksklusif oleh karena mengusung keetnisan dan kekhasannya.

Prasangka-prasangka yang timbul tersebut akan menghalangi proses damai di antara kedua ormas, karena akan sulit membangun rasa percaya satu sama lain. Pengakuan atas identitas ormas masing-masing akan menjadi salah satu legitimasi ketika para anggota mengatasnamakan ormas untuk melakukan kekerasan. Padahal setiap pemimpin dalam ormas tidak membenarkan adanya tindakan kekerasan tersebut.

2. Behaviour (B)

Pada konflik ormas PP dengan FBR penulis mengidentifikasi bahwa *behaviour* yang terjadi dalam konflik di antara kedua ormas ini adalah sebuah tindakan (*actions*) dan sebuah komunikasi. Tindakan yang dilakukan kedua ormas yang mengarah kepada tindakan kekerasan fisik. Dimana masyarakat juga mengetahui bahwa ormas PP yang identik dengan ormas yang penuh dengan tindakan kekerasan dan premanisme. Tindakan hal serupa juga ditemukan ketika terjadi konflik dengan ormas FBR. Berbagai aksi kekerasan diantara kedua ormas ini yang tidak tanggung-tanggung sudah memakan korban. Hal ini juga berawal dengan minimnya komunikasi yang baik di antara kedua ormas. Suatu organisasi juga biasanya akan mempertahankan identitas organisasinya sehingga rela melakukan

tindakan apapun demi marwah organisasinya itu sendiri.

3. *Contradiction* (C)

Hal-hal yang menyebabkan terjadi kontradiksi dalam konflik ormas PP dan FBR dikarenakan terdapat kebijakan yang diskriminatif, yaitu bagaimana kebijakan setempat dalam memberikan peluang dalam pekerjaan ataupun usaha lainnya, kemudian disparitas ekonomi yaitu adanya ketimpangan dalam pembangunan sehingga menyebabkan perbedaan pendapatan yang diterima masyarakat.

Kemudian yang menjadi pertentangan dalam konflik ini juga disebabkan adanya kepentingan masing-masing ormas. Kepentingan tersebut terkadang bentrok dengan kepentingan ormas lainnya dan hal ini tidak dijumpai oleh pemerintah sehingga yang terjadi adanya konflik berupa tindakan aksi kekerasan yang mengganggu ketertiban masyarakat lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ormas FBR dan PP memiliki basis kuat di akar rumput dan sangat piawai memperluas pengaruh. Tidak heran, massa kedua ormas ini semakin meningkat seiring dengan kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi. Sebab, menjadi pilihan pekerjaan alternatif untuk memperoleh penghasilan. Dengan tidak mementingkan keterampilan dan keahlian khusus yang terutama memiliki keberanian dan loyalitas terhadap kelompok/ormas terkait.

Konflik yang terjadi di antara ormas PP dan FBR merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihindari, karena setiap kelompok atau orang yang tidak memiliki kesamaan tujuan pasti akan berakhir dengan konflik. Para pengurus organisasi juga sudah berusaha membangun komunikasi yang baik diantara kedua ormas, agar konflik tidak terus berlanjut, namun tidak dapat dipungkiri lapisan anggota tiap ormas yang mungkin tidak dapat dijangkau seluruhnya. Sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat

menjangkau lapisan anggota ormas terutama pada lapisan bawah agar konflik terutama aksi kekerasan dapat dihindari.

Kegiatan berbentuk pelatihan, terutama untuk pembentukan karakter dan mental para anggota ormas agar tidak mudah terprovokasi dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan dan kondisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1-10. DOI: 10.24198/jkrk.v1i1.20887
- Arif, A. (2013). *Pemuda Pancasila dan Rezim Represif Orde Baru* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24008>
- Dwi Eriyanti, L. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- Febrianyah, R. (2013). Radikalisme berlatar belakang agama dalam Masyarakat (studi kasus pada ormas front pembela islam di kota Palembang). In *Universitas Sriwijaya* (Vol. 5, Issue 2). Sriwijaya.
- Fisher, S. (2000). *Mengelola Konflik* (S.N Kartikasari (ed.)). The British Council Indonesia. <http://chairululid.lecture.ub.ac.id>
- Galtung, J. (1965). Institutionalized Conflict Resolution. *Journal of Peace Research*, 2(4), 348-397. <https://doi.org/10.1177/00223433650200404>
- Galtung, J., & Fischer, D. (2013). *Johan Galtung: Pioneer of Peace Research*.
- Gusti, I., Ratih, A., Atmika, C. D., Madjid, M. A., & Malik, I. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Provinsi Dki Jakarta Dalam Penanganan Konflik Antara Organisasi Masyarakat*

- Pemuda Pancasila Dan Forum Betawi Rempug Di Jakarta Tahun 2016-2018 the Role of the Government of the Province of Dki Jakarta in Conflict Handling Between P.* 53–78.
- Gusti, I., & Santika, N. (2020). Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), 127–137. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28437>
- Ismiati, H., & Fedryansyah, M. (2017). Konflik Antar Warga di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara Abstrak Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara adalah salah satu wilayah Indonesia dengan masyarakat yang heterogen . Beberapa etnis masyarakat di Tanjung yang padat penduduk . Hal ini menjadikan mul. *Jurnal Empirika*, 8364(1990), 1–14.
- Isnaini, A. (2017). Kekerasan Atas Nama Agama. *Kalam*, 8(2), 213. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.221>
- Kamil, F. (2019). *CIVIL SOCIETY DAN PREMANISME Studi Terhadap Sistem Rekrutmen Anggota Forum Betawi Rempug Gardu 0176*.
- Kartono, Sugandar, F. A., & Azis, A. (2018). Peranan Polres Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan. *Pamulang Law Review*, 1(2), 59–74.
- Pathak, B. (2014). *Johan Galtung's Conflict Transformation Theory for Peaceful World: Top and Ceiling of Traditional Peacemaking*.
- Pramono, G. E. (2015). Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Kelompok Kekerasan (Studi kekerasan Ormas di Jakarta). *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 1167–1180. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.25>
- Pramono, G. E. P. (2020). A new decade for social changes. *Technium Social Sciences Journal*, 6(December), 101–105.
- Susanto, E., Maftuh, B., Malihah, E., & Budimansyah, D. (2020). Analisis penanganan konflik antar organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 20(1), 92–96. <https://doi.org/10.21009/jimd.v20i1.15666>
- Yutizar, & Muhajir. (2021). Eksistensi ormas islam dalam membendung faham radikalisme dan intoleransi berbangsa dan bernegara di kota langsa. *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5, 29. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2778>